

ABSTRAK

Keberadaan lembaga negara merupakan unsur penting negara dalam menjalankan fungsi-fungsi negara untuk mencapai tujuan negara. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat lembaga negara di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan lembaga negara di luar UUD NRI Tahun 1945 yang membentuk satu kesatuan proses dalam pelaksanaan fungsi negara. Permasalahan penelitian ini meliputi tidak adanya pengaturan terkait hubungan dan penyelesaian sengketa lembaga negara di luar UUD NRI Tahun 1945 sehingga menimbulkan celah problematika.

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan lembaga negara di luar UUD NRI Tahun 1945 dengan lembaga di dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diketahui melalui peraturan yang mengatur masing-masing lembaga negara di UUD NRI Tahun 1945 dan adanya celah kekosongan hukum serta pemenuhan legal standing pada penyelesaian sengketa lembaga negara di luar UUD NRI Tahun 1945.

Kata kunci : Hubungan, Penyelesaian Sengketa, Lembaga Negara Indonesia

ABSTRACT

The existence of state institutions is an important element of the state in carrying out state functions to achieve state goals. In Indonesia's constitutional system, there are state institutions in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and state institutions outside the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that form a unified process in the implementation of state functions. The problems of this study include the absence of arrangements related to relations and dispute resolution of state institutions outside the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, causing a gap in problems.

This research is normative legal research conducted in a literature study with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach.

The results of this study show that the relationship between state institutions outside the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and institutions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be known through regulations governing each state institution in the 1945 NRI Constitution and there are loopholes in legal vacancies and the fulfillment of legal standing in the settlement of disputes of state institutions outside the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords : Relationships, Dispute Resolution, Indonesian State Institutions